



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 61/KM.10/2022

TENTANG

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS  
BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG  
BERLAKU UNTUK TANGGAL 23 NOVEMBER 2022 SAMPAI DENGAN 29  
NOVEMBER 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak  
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan  
atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan  
atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan  
dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan  
Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan  
Penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang  
asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang Rupiah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri  
Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea  
Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan  
Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan  
Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 23  
November 2022 sampai dengan 29 November 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak  
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali  
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun  
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor  
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak  
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan  
atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah  
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.04/2015 tentang Nilai Tukar Mata Uang yang Digunakan untuk Penghitungan dan Pembayaran Bea Masuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1897);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
  7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 320/KMK.01/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

3 -

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KMK.01/2021 tentang Uji Coba Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Proses Penetapan KMK dalam Bentuk Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 23 NOVEMBER 2022 SAMPAI DENGAN 29 NOVEMBER 2022.

KESATU : Menetapkan Nilai Kurs sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 23 November 2022 sampai dengan 29 November 2022 sebagai berikut:

1.	Rp	15.611,00	Untuk dolar Amerika Serikat (USD)	1,-
2.	Rp	10.476,76	" dolar Australia (AUD)	1,-
3.	Rp	11.715,12	" dolar Kanada (CAD)	1,-
4.	Rp	2.172,46	" kroner Denmark (DKK)	1,-
5.	Rp	1.994,80	" dolar Hongkong (HKD)	1,-
6.	Rp	3.423,36	" ringgit Malaysia (MYR)	1,-
7.	Rp	9.578,54	" dolar Selandia Baru (NZD)	1,-
8.	Rp	1.550,68	" kroner Norwegia (NOK)	1,-
9.	Rp	18.510,50	" poundsterling Inggris (GBP)	1,-
10.	Rp	11.372,37	" dolar Singapura (SGD)	1,-
11.	Rp	1.481,13	" kroner Swedia (SEK)	1,-
12.	Rp	16.471,53	" franc Swiss (CHF)	1,-
13.	Rp	11.162,40	" yen Jepang (JPY)	100,-
14.	Rp	7,43	" kyat Myanmar (MMK)	1,-
15.	Rp	191,77	" rupee India (INR)	1,-
16.	Rp	50.694,55	" dinar Kuwait (KWD)	1,-
17.	Rp	70,13	" rupee Pakistan (PKR)	1,-
18.	Rp	272,43	" peso Filipina (PHP)	1,-
19.	Rp	4.153,25	" riyal Arab Saudi (SAR)	1,-
20.	Rp	42,50	" rupee Sri Lanka (LKR)	1,-



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

4 -

21. Rp	436,46	"	baht Thailand (THB)	1,-
22. Rp	11.363,89	"	dolar Brunei Darussalam (BND)	1,-
23. Rp	16.159,26	"	euro (EUR)	1,-
24. Rp	2.200,38	"	renminbi Tiongkok (CNY)	1,-
25. Rp	11,74	"	won Korea (KRW)	1,-

KEDUA : Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam Diktum KESATU, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2022 sampai dengan 29 November 2022.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Wakil Menteri Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Pajak;
5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 November 2022

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Ttd.

FEBRIO NATHAN KACARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal  
u.b.

KEPALA BAGIAN UMUM



Ditandatangani secara elektronik  
Muhammad Yusmal Nikho